

MODEL PENGELOLAAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN PROGRAM STUDI GURU SEKOLAH DASAR FKIP UMS

Muhroji dan Catur Budi Setyanto

Program Studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Surakarta
simuhroji@yahoo.com

ABSTRACT

The purposes of this study are threefolds: a. Describe the management of PPL of PGSD FKIP-UMS conducted so far. b. Formulate the management of model PGSD FKIP PPL-UMS in accordance with the demands of competence. c. Describe the policies that should be done so that the PPL management of PGSD FKIP-UMS match with the needs of stakeholders. The type of the research is qualitative research with design phenomenology. The experiment is conducted in the Faculty of Teacher training of UMS, School of partners/where PPL is conducted and associated institutions. The sources of the data are in the form of guidelines for the implementation of PGSD PPL and PPL documents and resource activities. The data collection techniques using the techniques of documentation, observation, and interviews as well as a forum group discussion (FGD). The data are analyzed critically. Critical analysis is conducted are a flow includes the steps of data reduction, data display and conclusion. The validity of the data is done by triangulation of methods and sources and do forum group discussion (FGD). The results of the study can be stated as follows : 1. PPL PGSD management : a. implemented by the management unit of PPL, b. PPL management of model of FKIP PGSD-UMS can be broadly grouped into two, namely : 1). PPL programmed, and 2). PPL independent. c. PPL program is intended for regular students, implemented in semester VII, and PPL Independent of PSKGJ for students/students who have become teachers, implemented according to the needs. d. PPL in the curriculum of PGSD FKIP-UMS is an integral part in preparing the prospective students as professional teachers. e. PPL PGSD FKIP-UMS is more emphasized on the practice of schooling and learning practices. 2. PPL PGSD model was promoted “Model Pengelolaan Terpadu/Kolaboratif”, PGSD FKIP-UMS relationship with partner school not only in implement PPL stage. But since PGSD Curriculum development, implementation PPL to reporting stage. 3. policies that should be done PGSD FKIP-UMS are : a. It has “Laboratorium School”; b. PPL financing should include comprehensive activities; c. election partner school with more emphasis on teacher competence officials than school accreditation.

Keywords: *PPL Programmed. PPL Independent, Integrated Management Model / Collaborative.*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia menunjukkan perhatian yang cukup besar terhadap peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari adanya peraturan standardisasi nasional pendidikan yang selalu disesuaikan dengan kebutuhan, standar kelulusan yang semakin meningkat, pengawasan penyelenggaraan/pengelolaan lembaga pendidikan yang semakin intensif, seperti adanya akreditasi dan persyaratan guru yang semakin tinggi.

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan peran guru sangat penting. Hal ini dapat dilihat adanya regulasi yang berkaitan dengan guru. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan, menegaskan peranan strategis guru dan dosen dalam peningkatan mutu pendidikan. Guru merupakan jabatan profesional yang menuntut agar guru memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Terkait dengan hal tersebut di atas, dalam upaya meningkatkan mutu guru sebagaimana diamanahkan UU No. 14 Tahun 2005 dan PP 74 Tahun 2008, menyebutkan bahwa guru harus berpendidikan minimal S1/D-IV dan wajib memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Mengacu pada UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 6 yang menyatakan bahwa guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang sehat jasmani dan rohani, memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, maka FKIP-UMS sebagai LPTK

pencetak guru ikut bertanggungjawab untuk mengawal amanah UU tersebut.

Pelaksanaan PPL yang diselenggarakan FKIP-UMS sampai saat ini kurang efektif. Hal ini disebabkan rasio sekolah mitra yang dilibatkan dalam pelaksanaan PPL dengan mahasiswa peserta PPL kurang ideal. Rata-rata setiap sekolah mitra membina 30-35 mahasiswa non PGSD dan PGPAUD, sedangkan mahasiswa PGSD dan PGPAUD antara 10-12 mahasiswa setiap sekolah mitra. Akibatnya frekuensi praktek mengajar dan pembimbingan mahasiswa PPL dirasakan masih kurang maksimal.

Rasio dosen pembimbing lapangan dengan mahasiswa peserta PPL juga masih kurang ideal. Di mana untuk tahun akademik 2011/2012 rasio dosen mahasiswa PPI untuk PGSD satu dosen membimbing 20/24 mahasiswa. Di samping itu dosen di kampus tidak saja mengajar tetapi juga membimbing skripsi dan tugas tri darma perguruan tinggi yang lain, sehingga pelaksanaan pembimbingan PPL kurang maksimal, artinya belum terlibat dalam proses perencanaan, pembimbingan mengajar dan penilain uji kompetensi belum maksimal.

Pelaksanaan pembimbingan mahasiswa dalam PPL selama ini didominasi oleh guru pamong, akibatnya peran dosen pembimbing lapangan (DPL) masih kurang. Disamping itu, berdasarkan pengamatan sementara menunjukkan bahwa sebagian besar dari guru pamong belum memenuhi sebagai guru profesional sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 14 Tahun 2005. Guru pamong dalam pelaksanaan pembelajaran masih banyak menggunakan pendekatan yang konvensional. Padahal tuntutan ke depan pembelajaran harus menggunakan pembelajaran tematik integratif (Depdiknas 2013) yang aktif dan inovatif

Pembekalan yang diterima mahasiswa sebelum terjun di sekolah masih belum memadai. Pembekalan yang diberikan lebih banyak

berkaitan dengan proses pembelajaran, sementara tugas profesional harus didukung dengan berbagai ilmu pengetahuan, seperti psikologi, sosiologi, dan komunikasi. Materi-materi tersebut sebenarnya sudah diberikan kepada mahasiswa, tetapi perlu refreasing mendekati pelaksanaan PPL.

Pembelajaran mikro yang berbasis pembelajaran tematik integratif dan pembelajaran aktif (*active learning*) bagi mahasiswa PGSD akan berdampak pada tingginya tingkat kebermaknaan belajar dan ketuntasan belajar (*mastery learning*). Dari sinilah akhirnya penguasaan kompetensi calon guru SD akan meningkat. Kompetensi profesional pembelajaran tematik integratif dan pembelajaran aktif yang memadai memudahkan calon guru SD dalam melaksanakan tugas profesionalnya sebagai guru. Oleh karena itu, pembelajaran mikro bagi mahasiswa PGSD lebih dititik beratkan pembelajaran tematik.

Untuk mencapai tujuan dan *outcomes* sebagaimana dikemukakan di atas, program pengalaman lapangan (PPL) perlu dikelola dengan baik. Thesis ini akan mendeskripsikan pengelolaan PPL PGSD FKIP-UMS yang selama ini dilakukan, dan bagaimana model pengelolaan PPL PGSD FKIP-UMS yang sebaiknya dilakukan agar tujuan program studi PGSD FKIP-UMS menghasilkan guru profesional dapat tercapai.

Dalam rangka menghasilkan guru yang profesional tersebut FKIP-UMS harus berbenah diri. Salah satu aspek yang harus dibenahi agar menghasilkan guru yang profesional adalah pemberian bekal pengalaman mengajar yang optimal sebelum mahasiswa terjun di masyarakat, mengamalkan ilmunya sebagai guru. Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu kegiatan kurikuler yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa FKIP-UMS untuk mencapai derajat gelar sarjana pendidikan.

Program pengalaman lapangan akan dapat menghasilkan hasil yang maksimal perlu penge-

lolaan yang baik, dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Program S1 PGSD merupakan program baru, karena sebelumnya untuk menjadi guru SD cukup lulusan SLTA (SPG), Lahirnya UU No. 14 tahun 2005 mensyaratkan untuk menjadi guru SD harus minimal S1/D4. Program studi PGSD FKIP-UMS mulai dibuka tahun 2007, artinya pelaksanaan PPL bagi program studi PGSD baru dilaksanakan empat angkatan. Setiap diadakan evaluasi pelaksanaan PPL banyak sekali masukan baik dari guru pamong, dosen pembimbing maupun mahasiswa untuk perbaikan pengelolaan PPL. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan menjawab pertanyaan bagaimana pelaksanaan PPL PGSD FKIP-UMS seharusnya dilaksanakan.

Tujuan penelitian ini ada tiga: a. Mendeskripsikan pengelolaan PPL PGSD FKIP-UMS yang dilakukan selama ini. b. Merumuskan model pengelolaan PPL PGSD FKIP-UMS yang sesuai dengan tuntutan kompetensi. dan c. Mendeskripsikan kebijakan yang sebaiknya dilakukan agar pengelolaan PPL PGSD FKIP-UMS sesuai dengan kebutuhan *stake holder*.

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMS merupakan lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang menyelenggarakan pendidikan calon guru. Sejak tahun 2009 diberi kepercayaan pemerintah untuk melaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan dan pada tahun 2012 diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan. Sesuai dengan UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 seorang guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan nasional. Pendidikan Calon Guru SD (PGSD) di FKIP UMS mengacu pada UU tersebut. Lulusan PGSD FKIP-UMS diarahkan kepada penguasaan kompetensi sebagai tenaga profesional di bidang pendidikan seolah dasar.

Kompetensi guru (UU No 14 Tahun 2005, Pasal 10) meliputi; kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial,. Hal ini berarti bahwa seorang guru atau termasuk calon guru dituntut memiliki sejumlah kompetensi sebagai bekal untuk melaksanakan tugas secara profesional (PP No. 74 Tahun 2008, Pasal 3).

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan (UU No 14 Tahun 2005, Pasal 20), guru berkewajiban: a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Tugas guru sebenarnya cukup banyak, tetapi yang menjadi perhatian utama masyarakat pada umumnya adalah pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, semua mahasiswa PGSD FKIP-UMS selama mengikuti pendidikan di kampus diberi “pengalaman belajar” secara teoritik dan praktik sesuai dengan tuntutan profesi diatas. Pengalaman belajar secara teoritik diselenggarakan dalam perkuliahan, sedangkan pengalaman praktik diberikan di laboratorium dan di sekolah mitra.

Praktik di sekolah lebih menekankan pada praktek persekolahan dan praktik yang menekankan kemampuan melaksanakan pembelajaran, tanpa mengesampingkan kompetensi kepribadian maupun sosial. PPL merupakan puncak dari pembekalan yang diberikan kepada

mahasiswa dalam kaitannya dengan kompetensi yang harus dikuasai dan inti dari pendidikan guru itu sendiri.

Program pengalaman lapangan merupakan kegiatan kurikuler dengan bobot 4 sks dan dilaksanakan pada semester ke enam. Mahasiswa bisa melaksanakan PPL setelah mengambil mata kuliah kependidikan, pembelajaran, dan Micro-teachig. PPL bertujuan agar mahasiswa Program Studi S1 PGSD FKIP UMS memiliki kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Pelaksanaan PPL program studi PGSD FKIP-UMS melibatkan berbagai pihak, baik FKIP-UMS maupun pihak luar. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan dan persiapan yang matang, baik yang berhubungan dengan mahasiswa, dosen pembimbing, sekolah mitra, dinas pendidikan dan kebudayaan maupun yayasan yang membawahi sekolah mitra. Untuk menyamakan persepsi semua yang terlibat dalam pelaksanaan PPL dbuatkan pedoman PPL.

Pengelolaan pada dasarnya sama dengan manajemen, yang secara umum diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Manajemen berasal dari bahasa Inggris *to manage* yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan dan mengelola (Echols, J. M. Dan Hasan Shadily, 1987: 372). Apa yang dimaksud dengan manajemen, manajemen seperti istilah lain yang berhubungan dengan aktivitas manusia sulit definisikan secara tepat. Dalam kenyataannya tak ada definisi manajemen yang telah diterima secara umum. Mary Parker Follett menefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain (T. Hani Handoko, 2000: 10). Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer dalam mencapai tujuan organisasi melalui pengaturan orang lain untuk melakukan tugas-tugas yang mungkin diperlukan, jadi manajer tidak bekerja sendirian.

Definisi tersebut bisa saja digunakan, tetapi dalam kenyataannya manajemen pengertiannya bisa sangat luas, sehingga tidak ada definisi yang digunakan secara konsisten oleh semua orang. Definisi yang lebih kompleks dikemukakan oleh Stoner yang dikutip Hadari Nawawi (2000: 36) “manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan anggota organisasi dan menggunakan sumber-sumber daya organisasi lainnya, agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”.

Mengartikan manajemen sebagai seni berarti manajemen itu merupakan kemampuan dan ketrampilan pribadi seseorang. Sedang mengartikan manajemen sebagai proses menunjukkan bahwa manajemen itu merupakan cara yang sistematis dalam melakukan pekerjaan. Manajemen merupakan proses karena semua manajer, siapapun orangnya, apakah punya atau tidak kecakapan dan ketrampilan khusus harus melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Proses kegiatan-kegiatan manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan para ahli juga tidak ada kesepakatan mengenai kegiatan ini. *Perencanaan*, berarti bahwa para manajer memikirkan kegiatan mereka sebelum melaksanakan. Rencana ini disusun berdasarkan data, metode dan logika tertentu bukan berdasarkan pada dugaan atau perasaaan tertentu.

Pengorganisasian, berarti bahwa para manajer mengkoordinasikan semua sumber daya baik personal maupun material. Kemampuan manajer terletak pada kemampuan mengkoordinasikan semua sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengkoordinasian merupakan bagian vital dari tugas manajer.

Pengarahan, artinya manajer atau pemimpin mengarahkan, memimpin dan mempe-

ngaruhi bawahan untuk melakukan pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan. *Pengawasan*, artinya manajer berupaya untuk menjamin bahwa organisasi bergerak kearah tujuan yang telah ditentukan.

Pengelolaan PPL dalam penelitian ini artinya bagaimana program/kegiatan PPL di PGSD FKIP-UMS direncanakan, diorganisir, dilaksanakan dan bagaimana pengawasannya. Pengelolaan PPL program studi PGSD FKIP-UMS secara garis besar dibagi dua, yaitu a. terprogram, dan b. mandiri. PPL terprogram artinya tempat pelaksanaan PPL ditentukan oleh unit pelaksana PPL dan diperuntukkan bagi mahasiswa reguler, sedangkan PPL mandiri tempat PPL ditentukan oleh mahasiswa, diperuntukkan bagi mahasiswa yang sudah menjadi guru.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini penelitian kualitatif dengan desain fenomenologis. Artinya penelitian yang hasilnya menggambarkan fenomena yang terjadi pada pengelolaan PPL PGSD FKIP-UMS. Penelitian dilaksanakan di FKIP UMS, Sekolah mitra/tempat PPL dan lembaga yang terkait. Penelitian dilaksanakan mulai juli 2013-6 Januari 2014.

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder berkaitan dengan kegiatan PPL. Data yang dikumpulkan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi PPL, yang mencakup tempat, waktu, personal dan proses pengelolaan PPL. Data primer berasal dari nara sumber dan data sekunder diperoleh dari dokumen kegiatan PPL. Sumber data berupa pedoman pelaksanaan PPL PGSD, dan dokumen kegiatan PPL. Nara sumber dalam penelitian ini pimpinan fakultas, pimpinan program studi, kepala laboratorium *microteaching* dan PPL, dosen pembimbing lapangan, kepala sekolah, guru pamong/pembimbing dan mahasiswa.

Peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian dan siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara serta *forum group discussion* (FGD). Dokumentasi untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan Pelaksanaan PPL. Teknik dokumentasi penting dalam penelitian ini, karena penelitian ini diperuntukkan kejadian yang telah lalu atau pelaksanaan PPL tahun 2012 dan sebagian tahun 2013. Sedangkan teknik interview digunakan untuk mengetahui kebijakan pengelolaan PPL dan mengecek data dokumen yang ada. Sedangkan teknik observasi untuk mencocokkan data dokumen dan hasil interview dengan kondisi yang sebenarnya.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini disusun berdasarkan standar prosedur operasional PPL yang berlaku di buku pedoman maupun pelaksanaan yang dilakukan di beberapa perguruan tinggi lain. Wawancara dilakukan kepada pimpinan fakultas, pimpinan program studi, pengelola PPL, Dosen pembimbing dan wakil guru pembimbing. FGD dilakukan untuk mendapatkan masukan bagaimana model pengelolaan PPL yang sesuai dengan tuntutan kompetensi.

Data dianalisis secara kritis. Analisis kritis dilakukan dengan metode alir yang langkah-langkahnya meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis kritis untuk mencari kelebihan dan kelemahan model pengelolaan PPL PGSD FKIP-UMS Tahun 2012 dan membandingkan pelaksanaan dengan buku pedoman maupun membandingkan dengan tuntutan masyarakat sesuai dengan kompetensi.

Sumber data berupa pedoman pelaksanaan PPL, dan dokumen kegiatan PPL. Nara sumber dalam penelitian ini pimpinan fakultas, pimpinan program studi, kepala laboratorium *microteaching* dan PPL, dosen pembimbing lapangan, kepala sekolah, guru pamong dan mahasiswa. Validitas data dilakukan dengan

triangulasi metode maupun sumber serta dilakukan *forum group discussion* (FGD).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PPL merupakan salah satu kegiatan kurikuler yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa agar memiliki empat kompetensi yang dipersyaratkan untuk menjadi guru profesional, yaitu: kompetensi paedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Di Australia dibagi menjadi 3, yaitu: *profesional knowledge, profesional practice, dan profesional engagement* (*Standards For Graduating Teachers*, 2014). PPL merupakan kegiatan mengimplementasikan pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang diperoleh dari proses pembelajaran yang telah dilakukan mahasiswa selama tiga tahun di bangku kuliah (Pedoman, 2013; 1). Penelitian yang dilakukan oleh Edith Samuel Nayimuli (2009) dengan judul *Teaching Practice: a make or break phase for studen teachers*, menunjukkan bahwa Praktek mengajar di sekolah memberikan pengalaman yang positif bagi mahasiswa, tetapi juga mengalami tantangan yang mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap profesi guru. Oleh karena itu PPL harus dikelola dengan baik dan profesional. Artinya PPL harus direncanakan, diorganisir, dilaksanakan dan di kontrol/diawasi dengan baik.

Pengelolaan PPL mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan PPL. Kegiatan diawali dengan rapat koordinasi pengelola PPL dengan pimpinan program studi, pimpinan fakultas, dan PSKGJ, Rapat akan lebih baik apabila tidak hanya dilaksanakan menjelang pelaksanaan PPL, tetapi sebelumnya sudah diadakan rapat dengan dosen *microteaching* yang diharapkan memberikan bekal kepada mahasiswa dalam pelaksanaan PPL.

Model pengelolaan PPL PGSD-FKIP UMS secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu: 1. PPL terprogram, dan 2. PPL mandiri. Model pengelolaan terprogram adalah model pengelolaan dimana dari perencanaan sampai dengan evaluasi yang berperan aktif adalah unit pengelola PPL, sedangkan mahasiswa pasif. Mahasiswa melaksanakan apa yang sudah diprogramkan oleh unit pengelola PPL. Model pengelolaan terprogram diperuntukkan bagi mahasiswa reguler S1. Model pengelolaan mandiri adalah model pengelolaan dimana mahasiswa berperan aktif dalam menentukan lokasi dan guru pembimbing. Model pengelolaan mandiri diperuntukkan bagi mahasiswa yang sudah mengajar atau menjadi guru. Program ini merupakan kerjasama dengan dinas pendidikan untuk meningkatkan kompetensi guru yang belum Sarjana.

Perencanaan kegiatan PPL dilakukan oleh unit pengelola PPL pada Laboratorium *Microteaching* dan PPL FKIP-UMS. Perencanaan kegiatan PPL terprogram dilaksanakan pada bulan mei-juni tahun berjalan sedangkan PPL mandiri dapat dilakukan setiap saat. Perencanaan meliputi penentuan lokasi/tempat pelaksanaan PPL, program/kegiatan PPL dan rencana anggaran PPL.

Tempat atau sekolah yang dipakai pelaksanaan PPL harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Sekolah harus berakreditasi minimal B, b. Lokasi disekitar kampus UMS (kurang dari 10 km). c. Jumlah murid cukup, d. Memiliki minimal seorang guru yang profesional(s1 atau sertifikat pendidik), e. Bersedia menjalin kerjasama dengan FKIP-UMS. Untuk PPL mandiri tidak memperhatikan syarat-syarat tersebut.

Pada tahun 2013 mahasiswa PGSD FKIP-UMS yang mengikuti PPL terprogram ada 263 orang, ditempatkan di 25 sekolah dasar. Kegiatan PPL yang direncanakan meliputi: 1). Rapat koordinasi pimpinan program, pimpinan

fakultas dan pengelola PPL. 2). Rapat koordinasi antara pimpinan fakultas dengan pimpinan sekolah mitra. 3). Penggandaan buku Pedoman PPL PGSD FKIP UMS. 4). Penyelesaian persyaratan akademik dan administrasi. 5). Pembekalan dosen pembimbing lapangan. 6). Pembekalan guru pamong. 7). Pendistribusian mahasiswa ke sekolah/lembaga mitra. 8). Penyerahan mahasiswa ke sekolah mitra. 9). Pelaksanaan PPL di sekolah mitra. 10). Monitoring pelaksanaan PPL di sekolah mitra. 11). Evaluasi pelaksanaan PPL dengan sekolah mitra. 12). Penarikan mahasiswa dari sekolah mitra. 13). Penyusunan laporan pelaksanaan PPL. 14). Penyerahan Laporan pelaksanaan PPL. 15). Penilaian Peserta. 16). Sertifikat dan Yudicium(Pedoman PPL, 2013; 4). Kegiatan PPL mandiri lebih sederhana, karena peserta sudah menjadi guru, Tujuannya lebih menekankan pada peningkatan kompetensi paedagogik dan kompetensi profesional.

Perencanaan PPL ditunjukkan adanya buku pedoman, standar operasional prosedur (SOP), dan anggaran kegiatan PPL. Pedoman dan SOP akan dapat dilaksanakan apabila didukung dengan anggaran yang memadai. Secara umum buku pedoman yang ada sudah dapat mendukung tercapainya tujuan PPL, tetapi dalam operasionalnya perlu pedoman yang lebih detail. Misalnya di SD yang dikembangkan 5 mata pelajaran, belum ada ketentuan mata pelajaran yang harus dipraktikkan mahasiswa, pedoman baru menunjuk pada frekuensi praktik pembelajaran. Pedoman akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila didukung dengan anggaran yang memadai.

Pengorganisasian pelaksanaan PPL PGSD FKIP-UMS tidak ditangani oleh ketua Program Studi, tetapi dilaksanakan oleh unit Laboratorium *Microteaching* dan PPL sebagai unit pelaksana teknis FKIP-UMS. Pengorganisasian pengelola PPL program studi PGSD FKIP-UMS sudah tepat tidak dikelola oleh program studi, karena beban program studi yang sudah berat untuk mengelola kegiatan kurikuler yang rutin. Kegiatan

PPL melibatkan banyak pihak, eksternal maupun internal oleh karena itu perlu pengelola yang memang hanya menangani PPL (Danny Meirawan, 2004 dan UNY, 2007).

Pelaksanaan PPL di sekolah mitra selama 2 bulan bagi SD biasa dan satu setengah bulan di SD yang melaksanakan pembelajaran *fullday*, PPL mandiri dilaksanakan selama satu bulan. Apabila ada libur selain hari minggu dan libur resmi tidak diperhitungkan. Waktu pelaksanaan ini sudah termasuk pelaksanaan ujian PPL. Observasi biasanya memakan waktu selama sekitar satu minggu. Mahasiswa selama dua bulan akan melaksanakan kegiatan persekolahan dan pembelajaran.

Praktik persekolahan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan mahasiswa Program Studi S1 PGSD FKIP UMS dalam bidang yang berkaitan dengan manajemen sekolah dan kegiatan ekstra kurikuler. Kegiatan praktik persekolahan yang dilakukan oleh mahasiswa antara lain: 1). Mengikuti rapat guru. 2). Membimbing kegiatan Pramuka. 3). Mengikuti kegiatan UKS. 4). Mengerjakan administrasi sekolah, 4). Membimbing ekstra kurikuler. 5). Mengikuti upacara bendera. 6). Tugas piket dan kegiatan lain yang menunjang wawasan keguruan.

Praktik Pembelajaran dilakukan secara terbimbing dan mandiri, hal ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa Program Studi S1 PGSD FKIP UMS. Mahasiswa melaksanakan praktik pembelajaran 10 sampai 20 kali sampai dinyatakan cakap dan trampil dalam melaksanakan proses pembelajaran oleh guru pamong. Mahasiswa prPPL mandiri hanya melaksanakan praktik pembelajaran aktif dengan membuat RPP terbimbing minimal 5. Frekuensi praktik pembelajaran dan praktik persekolahan di tiap sekolah sangat beragam, sehingga sering menimbulkan kecemburuan diantara mahasiswa. Praktik pembelajaran meliputi kegiatan: a). Membuat persiapan pembelajaran (RPP); b). Melaksanakan proses

pembelajaran; c. Menyiapkan media pembelajaran; dan d). Membuat evaluasi pembelajaran.

Koordinasi dengan sekolah mitra tahun 2013 dilaksanakan bersamaan dengan koordinasi dengan sekolah mitra SLTP dan SLTA, pelaksanaan kurang efektif, karena *pertama*, jumlah sekolah mitra SD 25, TK 10 dan sekolah menengah lebih dari 30. *Kedua*, materi PPL di sekolah dasar berbeda dengan PPL di sekolah menengah. *Ketiga*, waktu koordinasi dengan sekolah mitra terbatas, *keempat*, dosen pembimbing tidak hanya membimbing di satu sekolah, tetapi rata-rata dua sekolah. Koordinasi dengan sekolah mitra sebaiknya dipisahkan antara mitra sekolah dasar dengan mitra sekolah menengah maupun TK.

Pembimbingan mahasiswa perlu perbaikan, baik pembimbingan dari dosen maupun dari guru pamong. Pembimbingan dari Dosen kurang efektif, karena jumlah dosen PGSD FKIP-UMS jumlahnya terbatas, rasio pembimbingan 1 : 24, hal ini bisa diatasi dengan pelaksanaan PPL diadakan pada semester gasal dan semester genap atau lebih baik dibuat 3 gelombang/angkatan. Setiap dosen hanya membimbing 12 atau 8 mahasiswa setiap kegiatan PPL. Dengan konsekuensi membengkaknya anggaran PPL. Pembimbingan dari guru pamong sangat beragam, kualifikasi guru pamong harus jelas, sesuai dengan standar guru profesional (UU No. 15 Tahun 2005).

Pembimbingan dari guru pamong perlu spesifikasi yang jelas. Misalnya pembimbingan dalam pembelajaran kelas rendah, dan kelas tinggi, pembimbingan untuk mata pelajaran IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, IPS dan PPKN (UNY, 2007). Pembimbingan berkaitan dengan media pembelajaran maupun evaluasi pembelajaran. Penunjukan pembimbing sepenuhnya diserahkan kepada kepala sekolah, sementara kondisi guru yang ada di sekolah mitra belum

semua guru memenuhi guru profesional, baik pendidikan maupun kompetensinya. Pengelola PPL dalam menentukan sekolah mitra harus memilih sekolah mitra yang dapat membimbing mahasiswa sesuai dengan tujuan PPL. Syarat sekolah dasar bisa dipakai untuk PPL tidak hanya dilihat dari akreditasi sekolah tetapi di lihat sumber daya manusia/ guru yang dimiliki.

Pembekalan kepada mahasiswa sebenarnya sudah dilaksanakan jauh hari sebelum pelaksanaan PPL. Secara akademik sejak mahasiswa masuk semester satu. Pembekalan yang dilaksanakan di kampus dipandang masih kurang (FGD, 7 Nopember 2013), terutama berkaitan dengan: pengelolaan kelas, media pembelajaran, evaluasi pembelajaran, bahasa Indonesia dan psikologi pendidikan. Pembekalan di kampus disamping mata kuliah dan *microteaching* pada semester genap(semester 6) perlu di lengkapi dengan observasi di sekolah yang dilaksanakan secara terstruktur. Pembekalan mahasiswa menjadi tanggung jawab semua dosen program studi, tidak bisa hanya dilaksanakan menjelang pelaksanaan PPL. Penelitian yang dilakukan oleh magdalena Kubanyiova (2006) menunjukkan bahwa pelatihan terhadap guru yang dilakukan selama 20 jam tidak mengubah pengetahuan dan perilaku guru dalam proses pembelajaran Penelitian yang dilakukan oleh Azeem, Muhammad (2011) Sebagian besar mahasiswa tidak diberitahu tentang aturan dan peraturan sekolah tempat praktik.

Pembimbingan mahasiswa sangat beragam, ada yang mendapatkan bimbingan yang maksimal baik didalam kelas maupun di luar kelas(persiapan maupun refleksi) tetapi ada yang lebih banyak bimbingan diluar kelas, sementara di kelas guru terlalu percaya kepada mahasiswa. Pembimbingan pada awal pelaksanaan lebih intensif dibanding setelah satu bulan di lapangan. Penelitian yang dilakukan oleh Azeem, Muhammad (2011) menemukan bahwa mahasiswa praktikan tidak diberikan pelatihan praktis

metode yang beraneka ragam untuk mengajar sebelum mereka dikirim untuk praktik mengajar. Pembimbingan masih lebih bersifat umum, tetapi kurang detail (FGD, 7 Nopember 2013). Misalnya pembimbingan dalam strategi pembelajaran yang beraneka ragam (Hisyam Zaini, 2002), pembimbingan media pembelajaran atau pembimbingan dalam evaluasi pembelajaran. Pembimbingan yang bersifat umum terjadi karena beragamnya guru pamong yang ada, baik ditinjau dari latar belakang pendidikan, maupun pengalaman serta pengembangan profesi yang dilakukan oleh guru.

Dosen berkunjung ke sekolah untuk memberikan konsultasi 4-6 kali, dengan durasi waktu antara 1-2 jam(money, 2013). Pembimbingan lebih banyak bersifat umum, setelah bertemu kepala sekolah atau guru, bertemu dengan mahasiswa. Dosen pembimbing perlu mengagendakan pertemuan antara guru pamong dan mahasiswa duduk bersama (rapat supervisi) mengevaluasi pelaksanaan PPL setelah berjalan sekitar satu bulan.

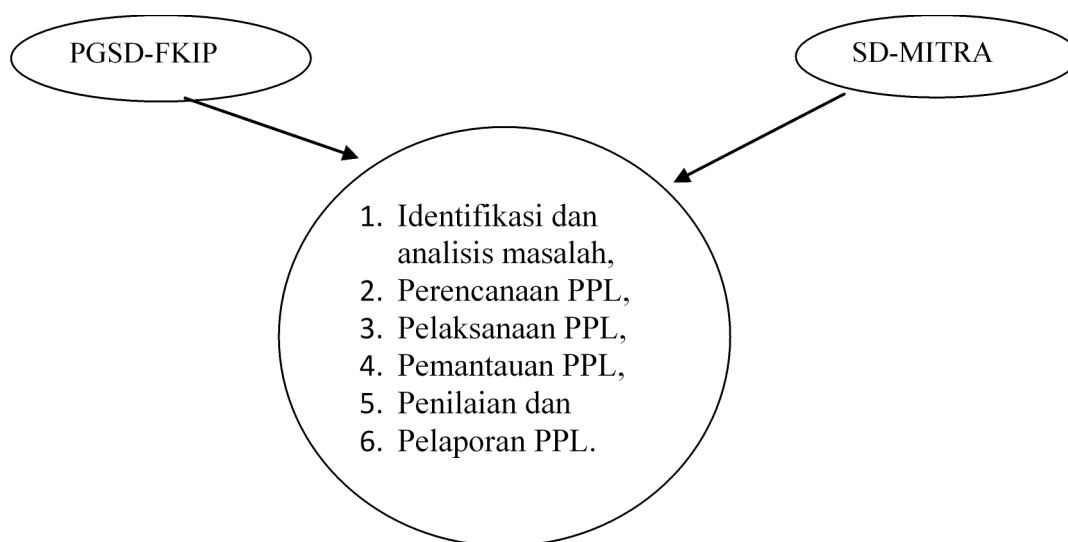
Laporan kegiatan sebaiknya dibuat setiap kegiatan dan bersifat akademik, misalnya kegiatan pembelajaran yang dilakukan dievaluasi dari berbagai segi apa yang sudah baik dan apa yang kurang dan mengapa hal ini terjadi, kemudian diperbaiki pada aktivitas selanjutnya.

Penilaian dalam ujian PPL harus menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP), tidak menggunakan Penilaian Acuan Norma (PAN). Karena untuk melaksanakan tugas profesional calon guru harus memiliki kemampuan dan kecakapan serta ketrampilan minimal yang harus dimiliki guru. Dalam kegiatan profesionalnya, Guru harus mempunyai kemampuan untuk merencanakan program pembelajaran(RPP) dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan proses pembelajaran kedua kemampuan ini diperoleh melalui latihan yang berkesinambungan (Depdiknas, 2012).

Pengawasan PPL dilakukan sejak perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Pengawasan dilaksanakan dengan membuat pedoman PPL, penyusunan program kerja PPL yang mengacu kepada kurikulum yang berlaku dan perkembangan pendidikan dan Iptek pada umumnya serta mengadakan monitoring dan evaluasi. Pengawasan pelaksanaan PPL dilaksanakan dengan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan pimpinan program studi dan pimpinan fakultas. Monitoring PPL mandiri dilaksanakan dengan cara inspeksi mendadak yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Rapat evaluasi PPL tahun 2013 dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2014. Rapat evaluasi dilaksanakan secara menyeluruh pelaksanaan PPL

mahasiswa FKIP, sehingga evaluasi PPL PGSD kurang maksimal. Sebaiknya rapat evaluasi PPL PGSD dilakukan terpisah dengan PPL program studi lain, karena mempunyai karakteristik yang berbeda dengan yang lain.

Memperhatikan pembahasan diatas penulis berpendapat pengelolaan PPL PGSD FKIP-UMS sebaiknya dilaksanakan terpadu. Pengelolaan PPL terpadu dimaksudkan pengelolaan PPL yang memadukan antara harapan dengan kenyataan, tugas dan tanggung jawab dengan hak, kepentingan PGSD FKIP-UMS dengan sekolah mitra, kegiatan dan anggaran serta pelaksanaan pembelajaran dan persekolahan yang varatif dan terstruktur.



Pengelolaan terpadu dapat juga disebut model pengelolaan kolaboratif, PGSD FKIP-UMS dengan sekolah mitra terlibat dalam setiap tahap kegiatan, mulai dari identifikasi dan analisis masalah, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian dan pelaporan PPL.

Pengelolaan PPL terpadu/kolaboratif dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan PPL PGSD dilaksanakan oleh unit pengelola PPL.
- b. Kemitraan PGSD FKIP-UMS dengan sekolah mitra tidak hanya pada tahap

implementasi PPL, tetapi sejak penyusunan kurikulum PGSD, pelaksanaan PPL sampai tahap pelaporan.

- c. PGSD FKIP-UMS memiliki “sekolah laboratorium”
- d. Pembekalan mahasiswa dilaksanakan secara terpadu. Tanggung jawab pembekalan menjadi tanggung jawab program studi, artinya semua dosen pengampu mata kuliah, tidak hanya menjadi dosen microteaching dan dosen pembimbing.

- e. Materi pembekalan dosen pembimbing dan guru pamong sama, sehingga persepsi terhadap pelaksanaan PPL sama.
- f. Pelaksanaan PPL dapat dilakukan pada setiap semester. Mahasiswa boleh memilih akan melaksanakan PPL pada semester gasal atau semester genap, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan.
- g. PPL dilaksanakan sesuai dengan kalender sekolah. Mahasiswa mulai melaksanakan PPL bersamaan dengan mulainya tahun ajaran/awal semester sekolah.
- h. Mahasiswa dapat melaksanakan PPL terprogram maupun mandiri. PPL terprogram dilaksanakan di sekitar kampus dan PPL mandiri dilaksanakan di sekolah dasar di daerah dimana mahasiswa bertempat tinggal/berasal.
- i. Pelaksanaan pembelajaran dan persekolahan yang variatif dan terstruktur. Pembelajaran yang dilaksanakan mahasiswa dengan menggunakan berbagai pendekatan, model dan strategi serta media pembelajaran. Praktik persekolahan dengan materi yang beraneka ragam.

Kebijakan yang harus dilakukan oleh FKIP-UMS agar pengelolaan PPL terpadu dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. PGSD FKIP-UMS perlu memiliki “Sekolah Laboratorium”. Artinya PGSD FKIP-UMS bekerjasama dengan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Daerah, Cabang atau Ranting Muhammadiyah yang ada di daerah sekitar UMS untuk menjadikan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah Muhammadiyah menjadi sekolah laboratorium. Manajemen personalia, siswaan, keuangan dan sarana tetap menjadi kewenangan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah, tetapi manajemen kurikulum menjadi kewenangan PGSD FKIP-UMS
- b. Kemitraan PGSD dengan Sekolah tidak bisa hanya berkaitan dengan pelaksanaan PPL, tetapi harus lebih luas. Mencakup pendidikan, penelitian dan pengembangan. Sekolah dilibatkan dalam penyusunan kurikulum PGSD, dan kegiatan akademik lainnya
- c. Pembiayaan PPL harus mencakup kegiatan yang komprehensif, pembiayaan tidak hanya dihitung pada pelaksanaan PPL, tetapi termasuk berbagai kegiatan yang mendukung pelaksanaan PPL
- d. Penunjukan sekolah mitra lebih menekankan pada kompetensi guru pamong dibanding akreditasi sekolah. PGSD FKIP-UMS perlu memiliki data base sekolah mitra. Data guru dan karyawan, sarana prasarana dan data siswa.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan PPL PGSD : a. dilaksanakan oleh unit pengelola PPL; b. model pengelolaan PPL PGSD-FKIP UMS secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu: 1). PPL terprogram, dan 1). PPL mandiri; c. PPL teprogram diperuntukkan bagi mahasiswa reguler, dilaksanakan pada semester VII, dan PPL Mandiri untuk mahasiswa PSKGJ/mahasiswa yang sudah menjadi guru, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan; d. PPL dalam kurikulum PGSD FKIP-UMS merupakan bagian integral dalam menyiapkan mahasiswa sebagai calon guru profesional; e. PPL PGSD FKIP-UMS masih lebih menekankan pada praktik persekolahan dan praktik pembelajaran.
2. Model PPL PGSD yang diusulkan “Model Pengelolaan Terpadu/Kolaboratif”, Kemitraan PGSD FKIP-UMS dengan sekolah mitra tidak hanya pada tahap implementasi PPL, tetapi sejak penyusunan kurikulum

- PGSD, pelaksanaan PPL sampai tahap pelaporan.
3. Kebijakan yang seharusnya dilakukan PGSD FKIP-UMS adalah: a. perlu memiliki “Sekolah Laboratorium”; b. Pembiayaan PPL harus mencakup kegiatan yang komprehensif; c. Penunjukan sekolah mitra lebih menekankan pada kompetensi guru pamong dibanding akreditasi sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdikbud, 2012. *Kebijakan Pengembangan Profesi Guru*, Jakarta: Pusbangprogdi.
- Echols J. M. dan Hassan Shadily, 1987, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Edith Kiggundu, and Samuel Nayimuli, 2009, Teaching practice: a make or break phase for student teachers, *South African Journal of Education*, Copyright © 2009 EASA Vol 29: P. 345-358
- FKIP-UMS, 2012. *Program Pengalaman Lapangan*, Surakarta: Laboratorium Fakultas.
- FKIP-UMS, 2013. *Buku Pedoman FKIP*, Surakarta: FKIP-UMS.
- Helena Orrje, TT, The Incidence of OF ON-THE-JOB TRAINING, An Empirical Study using Swedish Data, Sweden: *Swedish Institute for Social Research Stockholm University* S-106 91 Stockholm P. 1-25.
- Hisyam Zaini dkk., 2002. *Desain Pembelajaran*, Yogyakarta: CTSD IAIN Yogyakarta.
- Kathleen Stassen Berger Theory and Practice: *Teaching in the Real World THE NEA HIGHER EDUCATION JOURNAL* 107,P. 107-116
- Marie Tejero Hughes & Diana Martinez Valle Riestra, 2012 , *Early Childhood Special Education: Insights from Educators and Families*, International Journal of Education, ISSN 1948-5476 2012, Vol. 4, No. 2 P. 59-73.
- Mamduh M. Hanafi, 1997, *Manajemen*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mulyadi dan Johny Setyawan, 2001, *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*, Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- Suharsimi Arikunto, 2008, *Manajemen Pendidikan*, Yogyakarta: Aditya Media.
- T. Hani Handoko, 1994, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

UNY, 2007. Panduan Praktik Pengalaman Lapangan, Yogyakarta: FIP-UNY

UPI,tt. Panduan Praktek Kependidikan(PPK), Bandung: UPT PPL.

Victorian Institute of Teaching, 2013. *Standards For Graduating Teachers*.

W. Qazi, K. J. Rawat, M. Y Sharjeel, and MS Shila DeviI, 2009, *Teacher Perception About Implementation Strategy Of B.Ed Teaching Practice In Real School Classrooms: Issues and Challenges*, *The S.U. Jour. of Ed. Vol. XXXVIII, 2008-09, Pp. 54-76*.